

**AKSELERASI PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL**

**Direktur Jenderal
Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

**Disampaikan pada
Workshop Nasional Akselerasi Penyusunan
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Jakarta, 21 Nopember 2013**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

MENGAPA RENCANA ZONASI

1. Kebutuhan manusia akan sumberdaya alam termasuk dari laut semakin meningkat, disisi lain, sumberdaya laut tidak dapat mengejar tingginya tuntutan tersebut
2. Laut dianggap sebagai “milik bersama” atau open-access sehingga banyak pihak yang ingin mengambil manfaat sebesar – besarnya dari laut. Hal ini seringkali mengakibatkan pemanfaatan sumberdaya laut yang berlebihan seperti overfishing
3. Pemanfaatan sumberdaya laut tidak dapat dilepaskan pada mekanisme pasar melalui mekanisme “demand-supply” Karena tidak semua sumberdaya laut seperti habitat alam, dan rantai makanan dapat dinilai dengan uang. Tanpa ada pengaturan, sumberdaya yang tidak dapat dinilai dengan uang akan “KALAH” bersaing dalam ruang laut.
4. Tingginya tuntutan akan pemanfaatan sumberdaya laut dapat menyebabkan konflik pemanfaatan.

Karena alasan alasan tersebut maka harus ada suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat atau negara untuk memutuskan sumberdaya alam laut yang mana yang dapat dimanfaatkan seiring jalannya waktu dan tersedianya ruang. Proses tersebut adalah perencanaan zonasi.

UU No.27/2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

STRUKTUR PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MENURUT UU 27/2007



**POSISI DAERAH SAAT INI
DALAM PENYUSUNAN RZWP3K**

	SUDAH PERDA	DALAM PROSES	BELUM MENYUSUN
PROV	3	26	5
KAB / KOTA	9	106	204
Jumlah	12	132	209
	3,4 %	37,4 %	59,2 %

MENGAPA PERLU AKSELERASI

- Rendahnya pemenuhan kewajiban penyusunan RZWP3K oleh Pemerintah Daerah walaupun UU 27/2007 telah diberlakukan selama 6 tahun
- RZWP3K menjadi keharusan apabila ingin mewujudkan arahan RPJP sebagai negara kepulauan yang kuat dan mandiri.
- Prasyarat investasi dan pembangunan di laut untuk mendorong ekonomi kelautan sebagai prime mover perekonomian nasional dan abad Asia Pasifik yang berpusat pada kelautan
- Trend dampak bencana dan perubahan iklim yang semakin meningkat memerlukan RZWP3K sebagai bagian dari instrumen pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim

TUGAS BERSAMA MEWUJUDKANNYA

- Tugas bersama semua stakeholder kelautan
- Butuh peran semua pihak:
 1. Pemerintah : menyiapkan dukungan kebijakan dan teknis
 2. Pemda: memastikan pelaksanaan, penganggaran, dan koordinasi di lapangan
 3. Legislatif: memastikan dukungan legislasi dan pendanaan kegiatan
- Menjadi prioritas dan tuntutan dalam perencanaan pembangunan dan proses-proses demokrasi (misal: Janji Pilkada)

BEBERAPA UPAYA STRATEGIS

Upaya Kunci	Tujuan	Pemegang Peran Utama
Penyediaan manual, pedoman, SOP penyusunan RZWP3K, Sosialisasi, dan Bimtek	Memudahkan dalam proses penyusunan RZWP3K secara teknis dan administratif	Kementerian KP, BKPRN, Universitas, Asosiasi/himpunan ahli
Dukungan administratif dan pendanaan	Memastikan kesiapan kelembagaan dan pembiayaan penyusunan RZWP3K	Kementerian KP, Kementerian Dalam Negeri, Pemda, DPRD
Memperbanyak pilot project RZWP3K dan implementasinya	Menyediakan referensi RZWP3K sesuai dengan prioritas/tipologi daerah (mis. Perikanan, pariwisata, industri, kota pantai, dll)	Kementerian KP, Pemda, swasta, BUMN
Memprioritaskan finalisasi RZWP3K dalam RPJMD	Memberikan komitmen program dan politik kepala daerah dalam penyusunan dan finalisasi RZWP3K	Kemendagri, Pemda, DPRD, Perguruan Tinggi/NGO/stakeholder lokal

Terima kasih